

**STUDI MODEL KEMITRAAN DALAM MENGELOLA
SEKTOR WISATA PANTAI DESA TANAH KUNING**
(Studi Kasus Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur,
Kabupaten Bulungan)



SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

ANDHIKA MASHARAFI
NPM. 201851009

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2023**

PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Andhika Masharafi
NPM : 201851009
Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **STUDI MODEL KEMITRAAN DALAM MENGELOLA SEKTOR WISATA PANTAI DESA TANAH KUNING (Studi Kasus Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan)** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak dikemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, selain dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 24 Juli 2023

Yang menyatakan,



Andhika Masharafi
NPM. 201851009

PENGESAHAN SKRIPSI

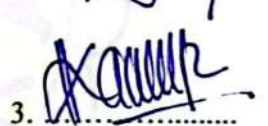
JUDUL : **STUDI MODEL KEMITRAAN DALAM MENGELOLA
SEKTOR WISATA PANTAI DESA TANAH KUNING
KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR
KABUPATEN BULUNGAN**

DISUSUN OLEH : **ANDHIKA MASHARAFI**
NPM. 201851009

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ketua/Penguji 1 | Iskandar, S. Sos., M.I.P.
NIDN. 1125118201 |
| 2. Sekretaris/Penguji 2 | Irsyad Sudirman, M.A., M.I.P.
NIDN. 1103017701 |
| 3. Pembimbing/Penguji 3 | Kartini Maharani Abdul, M. Si
NIDN. 1122049202 |

1. 
2. 
3. 

Tanjung Selor, 25 Juli 2023

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik


Dekan

Wempi Feber, S. Sos., M. Si
NIDN. 1113027101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Studi Model Kemitraan dalam Mengelola Sektor Wisata Pantai Desa Tanah Kuning (Studi Kasus Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan)” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dr. Didi Adriansyah, S.T.P., M.M, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Wempi Feber, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Iskandar, S. Sos., M.I.P, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor yang sekaligus bertindak sebagai Penguji 1;
4. Ibu Kartini Maharani Abdul, S.I.P., M. Si, selaku Pembimbing Skripsi;
5. Bapak Irsyad Sudirman, M.A., M.I.P, selaku Penguji 2;
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. Kedua orangtua dan saudaraku tercinta;
8. Kepala Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan beserta seluruh jajarannya;
9. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 25 Juli 2023

Penulis

Andhika Masharafi

STUDI MODEL KEMITRAAN DALAM MENGELOLA SEKTOR WISATA PANTAI DESA TANAH KUNING

(Studi Kasus Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur,
Kabupaten Bulungan)

Oleh :

Andhika Masharafi

NPM. 201851009

Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Kaltara

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan model kemitraan yang dilakukan di Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dan Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Objek Wisata Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif teknik wawancara dan observasi lapangan. Jenis penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, maupun data dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian menunjukkan model Kemitraan *Partnership* yang cocok dikembangkan dalam pengelolaan Wisata Pantai Desa Tanah Kuning. Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat membuat sebuah kebijakan untuk peningkatan kebersihan dan keindahan di objek wisata Pantai Tanah Kuning. Pemerintah dan Kelompok Masyarakat menghimbau kepada seluruh jajarannya yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan Objek wisata Pantai Tanah Kuning ini untuk lebih meningkatkan lagi kualitas kerjanya sesuai dengan Visi dan Misi.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pengelolaan wisata pantai tanah kuning berupa letak Pantai Tanah Kuning yang dekat dari jalan raya dan berada tepat di pesisir kota Kabupaten Bulungan, kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh akan pentingnya menjaga kebersihan, terjalinnya komunikasi antara dinas pariwisata dengan instansi lain yang terkait, lahan yang masih kurang mengakibatkan sarana dan prasarana di Pantai Tanah Kuning ini belum memadai.

Kata Kunci : Model Kemitraan *Partnership*, Wisata Pantai Desa Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan

PARTNERSHIP STUDY MODEL IN MANAGING THE BEACH TOURISM SECTOR IN TANAH KUNING VILLAGE

*(Research: Tanah Kuning Village, Tanjung Palas Timur District,
Bulungan Regency)*

Oleh:

Andhika Masharafi

NPM. 201851009

State Administration Study Program

Faculty of Social Science and Political Science

North Kalimantan University

ABSTRACT

This study describes the partnership model carried out at the Tanah Kuning Village Beach Tourism Object, East Tanjung Palas District, Bulungan Regency and to determine the supporting and inhibiting factors for managing the Tanah Kuning Village Tourism Object, East Tanjung Palas District, Bulungan Regency.

The research method used in this research uses descriptive qualitative techniques of interviews and field observations. This type of research is descriptive, namely to describe and examine data obtained from in-depth interviews, observations, as well as documentation data and literature studies.

The results of the research show that the Partnership Partnership model is suitable to be developed in the management of Tanah Kuning Village Beach Tourism. Government Partnership and Community Groups make a policy to improve cleanliness and beauty in the Tanah Kuning Beach tourist attraction. The Government and Community Groups appeal to all levels participating in the development of the Tanah Kuning Beach tourist attraction to further improve the quality of their work in accordance with the Vision and Mission. Supporting and Inhibitin.

Factors in the management of Tanah Kuning beach tourism are the location of Tanah Kuning beach which is close to the main road and is right on the coast of the city of Bulungan Regency, public awareness is starting to grow about the importance of maintaining cleanliness, establishing communication between the tourism office and other related agencies, land that is still lacking has resulted in inadequate facilities and infrastructure on the Tanah Kuning beach.

Keywords : *Partnership Partnership Model, Beach Tourism in Tanah Kuning Village, East Tanjung Palas, Bulungan Regency*

RIWAYAT HIDUP

Andhika Masharafi, lahir pada tanggal 03 Juli 2000 di Tanah Kuning, merupakan anak pertama dari lima bersaudara pasangan suami istri bernama Bapak Budi Rahman Patawari dan Ibu Wardiah.

Pada tahun 2006 memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 02 Tanjung Palas Timur dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 01 Tanjung Palas Timur pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018.

Pada pertengahan tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep	11
2.2 Penelitian Terdahulu	12
2.3. Kajian Teoritis	16
2.3.1 Konsep Kemitraan	16
2.3.2 Konsep Pengelolaan Pariwisata	21
2.3.3 Konsep Masyarakat	33
2.3.4 Konsep Pemerintahan Daerah	39
2.3.3 Konsep Masyarakat	33
2.4. Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.2 Jenis Penelitian	48
3.3 Data dan Sumber Data	49
3.4 Fokus Penelitian	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51

3.6	Uji Faliditas Data	52
3.7	Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Penelitian	55
4.1.1	Profil Desa Tanah Kuning	56
4.1.2	Model Kemitraan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan	59
4.1.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning	67
4.2	Pembahasan	46
a.	Model Kemitraan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan	77
b.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		xii
LAMPIRAN		xiv

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	47
4.1	Peta Kabupaten Bulungan	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang kaya serta beragam. Kekayaan dan keragaman alam dan budaya tersebut merupakan modal dasar dalam pembangunan. Dengan keberagaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, seperti potensi alam, flora, fauna, dan keindahan alam yang bentuknya berkepulauan kaya akan adat istiadat, kebudayaan, bahasa sehingga memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Daya tarik mendorong pemerintah untuk mendirikan industri pariwisata khususnya di daerah masing-masing yang memiliki potensi wisata untuk dapat menarik wisatawan berkunjung ke daerahnya sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar (Ermayanti, 2012).

Peran pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni, segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerjasama antar Negara (persahabatan antar bangsa), segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan mancanegara). Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Pengelolaan kegiatan pariwisata tentu sangat

diperlukan dalam upaya menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan bagaimana wisatawan membelanjakan uang sebanyak-banyaknya selama melakukan wisata. Oleh karena itu pengelolaan dan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-masing daerah.

PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Salah satu menyumbang dalam PDRB adalah sektor pariwisata, perdagangan dan perhotelan. Laju pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan dan perhotelan yang positif dan kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan peningkatan wisatawan yang datang ke Indonesia dari kurun waktu Januari hingga Desember 2022, terdapat 603.020.000 wisatawan Nusantara. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) kontribusi pada pendapatan domestik bruto (PDB) sektor pariwisata pada 2022 hingga kuartal ketiga sementara mencapai 3,6 persen naik signifikan dari 2021 yang hanya 2,40 persen. Dari data tersebut diketahui ada beberapa destinasi di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan Nusantara sepanjang tahun 2021. Berdasarkan data dari BPS tahun 2023, provinsi yang paling sering dikunjungi wisatawan Nusantara adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah wisatawan 155.114.120 orang. Sedangkan provinsi yang jarang dikunjungi oleh wisatawan Nusantara adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah wisatawan 223.367 orang. Hal ini

dikarenakan Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia sehingga sumber daya Wisata yang dimiliki masih belum dikelola dengan baik. Namun Kaltara memiliki potensi pariwisata yang komplit. Seperti wisata sejarah di Tarakan dan Kabupaten Bulungan, dan wisata kuliner dengan hasil laut seperti ikan, kepiting, kapah dan lainnya. Kekayaan alam lainnya yang terdapat di Kaltara, seperti minyak, batubara, gas bahkan air, dan terkait objek wisata lainnya. Walau masih sangat mentah dan bahkan hampir belum terjamah, Kaltara memiliki ragam air terjun, gunung, hutan konservasi beserta fauna unik khas Kalimantan. Namun yang patut disyukuri kini Provinsi Kaltara telah memiliki Dinas Pariwisata Kaltara yang tentunya akan dapat mengakomodir upaya-upaya Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kaltara.

Kabupaten Bulungan (dahulu bernama Kabupaten Bulongan) merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Nama Bulungan berasal dari sebuah kesultanan yang pernah ada di daerah tersebut yaitu Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas. Sejak tahun 1999, kabupaten ini telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Kabupaten Bulungan juga memiliki objek wisata yang tidak kalah menarik, baik wisata alam maupun wisata budaya yang sangat beraneka ragam. Berikut ini beberapa objek wisata yang terdapat di Kabupaten Bulungan antara lain seperti Sungai Kayan - Tanjung Selor, Sungai Giram - Peso, Air panas Sajau - Sajau, Gunung Putih -

Tanjung Palas, Air Hutan Gunung Seriang-Tanjung Selor, Air Terjun Idaman-Tanjung Selor, Gunung Rian – Kab. Tana Tidung, Pantai Tanah Kuning – Tanah Kuning, Pantai Kelapa – Manguapadi. (Disbudparpora Kabupaten Bulungan, 2023).

Kabupaten Bulungan memiliki luas wilayah 13.181,92 km² dan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan di bagian Utara, Laut Sulawesi dan Kota Tarakan di bagian Timur, Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) di bagian Selatan dan Kabupaten Malinau di bagian Barat. Berdasarkan hasil proyeksi interim hasil Sensus Penduduk 2020, diperoleh jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebanyak 713,62 ribu jiwa dengan populasi terbanyak berada di Kota Tarakan sebanyak 245,70 ribu jiwa. Kabupaten Bulungan menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 154,46 ribu jiwa. (Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2022).

Dalam pendekatan pembangunan wilayah dikenal adanya Kawasan strategis, kawasan prioritas dan kawasan andalan yang secara tidak langsung mengisyaratkan konsistensi kesepakatan, masih relevannya pendekatan kebijakan pusat pertumbuhan yang bermaksud untuk menimbulkan dan mengaglomerasikan investasi melalui pembangunan pada suatu kawasan, sebagai suatu cara yang efisien untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan yang salah satunya dapat sebagai Kawasan pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Bulungan. (Rancangan RPJPD Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025).

Sejalan dengan keberhasilan pembangunan sektoral, maka terlihat gejala yang menuntut perhatian pada dimensi ruang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah khususnya pada daerah perkotaan, serta belum menyentuh pemberdayaan potensi kawasan di Kabupaten Bulungan dengan kekhasannya untuk pengembangan pariwisata. Sumber dan potensi kepariwisataan yang tersebar di Kabupaten Bulungan masih belum tergali semuanya, hal ini memerlukan pengelolaan yang menyeluruh dan terpadu dengan sektor pembangunan lainnya. Menyadari akan potensi yang dimiliki serta pentingnya arti dan peranan pariwisata baik sebagai penghasil devisa maupun sebagai alat memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja, maka pemerintah Kabupaten Bulungan telah menggariskan bahwa dalam era globalisasi peran pariwisata sebagai unsur pembangunan daerah perlu ditingkatkan. (Rancangan RPJPD Kabupaten Bulungan Tahun 2005-2025).

Salah satu objek wisata yang terdapat di Kabupaten Bulungan adalah objek wisata Pantai Tanah Kuning yang merupakan objek wisata alam yang cukup populer. Pantai tersebut berada di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Nama Tanah Kuning diambil dari nama desa dimana pantai ini berada. Tanah Kuning adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, mekar dari desa Mangkupadi pada tahun 1964. Desa dengan luas ± 20.000 Ha ini merupakan desa pesisir pantai yang terletak diantara $117^{\circ},30''$ – $118^{\circ},02''$ BT – $02^{\circ},15''$ – $02^{\circ},50$ LU, berbatasan dengan muara Tanjung

Sepikat di sebelah Utara, desa Mangkupati di sebelah Selatan, desa Binai di sebelah Barat, dan laut Sulawesi di sebelah Timur. Daratan wilayah desa Tanah Kuning secara topografi memiliki 65% wilayah berbukit bukit dan 35% daratan dimanfaatkan masyarakat untuk wilayah pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan persawahan. Desa ini memiliki 11 Rukun Tetangga dan 3 Rukun Warga dengan jumlah penduduk ± 3354 Jiwa terdiri dari 837 KK dalam 671 rumah, dengan letak geografis desa yang merupakan daratan luas dan juga pesisir pantai. Desa yang merupakan pusat administrasi dari Kecamatan Tanjung Palas Timur itu memiliki potensi yang sangat besar dalam wisata pantai, namun demikian pengelolaan wisata pantai di Desa Tanah Kuning masih terbilang kurang maksimal sehingga sangat disayangkan jika potensi yang besar ini tidak dimanfaatkan dengan baik.

Objek wisata Pantai Tanah Kuning memiliki potensi berupa hasil laut yang berlimpah seperti ikan putih, ikan kakap merah, ikan teri/seribu, udang rebon dan berbagai jenis ikan lainnya. Selain hasil laut, Desa Tanah Kuning juga memiliki potensi sumber daya alam yang lain seperti kayu, batu bara, minyak bumi, kelapa, dan kelapa sawit. Pantai Tanah Kuning juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi area wisata, contohnya taman wisata Pantai Menara Pandang yang terletak di Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan dan didirikan pada tahun 2017, Pantai Tanah Kuning II (Pantai Menara Pandang) telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti taman, gazebo, dan tourist information center.

Dalam mengelola objek wisata, terdapat permasalahan pariwisata yang ada di Pantai Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan yaitu:

- a. Belum optimalnya pengelolaan objek wisata.
- b. Belum optimalnya informasi dan promosi produk-produk wisata
- c. Belum optimalnya dukungan infrastruktur daerah dalam menunjang pengembangan wisata daerah terutama akomodasi dan transportasi.
- d. Masih rendahnya keterlibatan swasta dalam mendukung pengembangan wisata daerah.
- e. Belum optimalnya upaya-upaya untuk memelihara dan melestarikan objek wisata.

Permasalahan-permasalahan dalam mengelola pariwisata ini tentunya menjadi pemicu bagi pemerintah daerah kabupaten Bulungan untuk terus mengembangkan objek wisata yang dimiliki khususnya Pantai Tanah Kuning agar mampu meningkatkan pendapatan dan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bulungan. Sehingga perlu dilakukan pengkajian lebih dalam hubungan kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Kemitraan menjadi kata kunci jika suatu destinasi atau daya tarik wisata diperhadapkan pada persaingan menarik wisatawan untuk datang ke suatu destinasi. Fyall dan Garrod (2003) berpendapat bahwa persaingan dalam dunia usaha pariwisata serta pemberian pelayanan ke customer menjadi alasan pentingnya kemitraan untuk diterapkan. Selain itu, multiplier effect dari pariwisata yang di dalamnya melibatkan individu ataupun

kelompok menjadikan model kemitraan penting untuk dipahami dan diimplementasikan.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa betapa pentingnya sektor pengembangan pariwisata. Sehingga pengembangan ini perlu dilakukan kerjasama atau kemitraan melalui pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata di daerah itu. Sesuai dengan pernyataan Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan Tirta Wisata.
- c. Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Tirta Wisata yang dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar
- d. Saling membutuhkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam pengelolaan Tirta Wisata.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu adanya sebuah penjabaran lebih mendalam mengenai model kemitraan dalam mengelola objek wisata dan bagaimana implementasinya secara nyata. Sehingga

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Studi Model Kemitraan Dalam Mengelola Sektor Wisata Pantai Desa Tanah Kuning”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Model Kemitraan yang dikembangkan dalam mengelola Wisata Pantai Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Objek Wisata Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan model kemitraan yang dikembangkan dalam mengelola sektor Wisata Pantai Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Objek Wisata Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan dari keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pemerintahan.

b. Manfaat dari praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi pariwisata secara umum, dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan dalam pemahaman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Identifikasi/Pembatasan Konsep

Pembatasan konsep bermanfaat bagi pembatasan mengenai konsep penelitian yang diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya konsep dan data yang diperoleh di lapangan. Penentuan pembatasan konsep penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi pariwisata dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data/konsep yang relevan dan mana data/konsep yang tidak relevan.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi (Sugiyono 2017;207) :

- a. Bagaimana model kemitraan dalam mengelola Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian akan di uraikan secara ringkas, meskipun terdapat kemiripan dalam ruang lingkup penelitian tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian ini, baik dalam obyek dan periode waktu yang digunakan. Sehingga penelitian terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Pada tabel 2.1 di bawah ini memaparkan beberapa penelitian terdahulu tersebut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Judul	Hasil
Ulil Amri Syam (2016)	Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng	a) Dari tiga bentuk Kemitraan yang di terapkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kemitraan yang paling dominan dalam penelitian ini adalah Kemitraan Partnership. b) Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat membuat sebuah kebijakan untuk peningkatan kebersihan dan keindahan di objek wisata Pantai Seruni. c) Pemerintah dan Kelompok Masyarakat menghimbau kepada seluruh jajaran yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan Objek wisata Pantai Seruni ini untuk lebih meningkatkan lagi kualitas kerjanya sesuai dengan Visi dan Misi. d) dengan terbentuknya kerjasama sama antara Pemerintah dan Kelompok Masyarakat ini, masyarakat umum yang ada di kota bantaeng secara perlahan mulai menyadari akan pentingnya kebersihan dan hidup sehat.
Sony Setyo Nugroho	Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan	Peran stakeholder dalam pengelolaan pariwisata belum bisa berjalan secara

(2019)	Pariwisata Di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara	<p>optimal sebagian besar kemitraan dan kerjasama yang dilakukan masih belum memberikan kontribusi yang cukup nyata bagi peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar obyek wisata. Pengelolaan pariwisata akan terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama serta koordinasi yang intensif dari berbagai instansi maupun stakeholder yang terkait. Kegiatan pariwisata di Karimunjawa saat ini masih belum tertangani secara profesional dan masih berjalan secara sektoral, hal ini dikarenakan adanya permasalahan kelembagaan yang sering dihadapi sekarang ini antara lain kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, kurangnya pengawasan pada tingkat pelaksanaan dan juga masih terbatasnya personil sebagai pelaksana di lapangan, maupun SDM di objek pariwisata yang belum banyak mendukung.</p>
Bekti Hidayat (2018)	Model Kemitraan Untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Objek Wisata di Wilayah Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Ayah	<p>Potensi wisata baik alam, budaya dan minat khusus di lima desa sangat berpelung untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Dari lima desa tersebut desa karangduwur meruapakan desa yang telah lebih siap dalam mengelola dan mengembangkan kawasan wisata pesisir.</p> <p>Masyarakat berharap pengelolaan kawasan pariwisata di pesisir pantai selatan dapat melibatkan masyarakat lokal, pihak eksternal dan dikelola secara transparan</p> <p>Pengembangan dan pengelolaan pariwisata di pesisir pantai selatan berperan penting didalam mengembangkan perekonomian</p>

		<p>masyarakat dan mampu menciptakan peluang kerja bagi warga lokal. Infrastruktur jalan menuju kawasan wisata pesisir yang kondisinya kurang memadai menjadi hambatan utama dalam menarik para wisatawan untuk berkunjung di objek wisata tersebut. Model <i>quadruple helix</i> menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan seluruh actor yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kawasan pesisir pantai selatan.</p>
Made Arie Wahyuni (2017)	Studi Kemitraan Desa Adat Dengan Pelaku Usaha Wisata Untuk Pengembangan Ekowisata Lovina di Kabupaten Buleleng	<p>(1) Potensi wisata mencakup 4 aspek yaitu atraksi wisata, akomodasi wisata, akses jalan dan kelembagaan; (2) Terdapat 4 bentuk kemitraan yaitu Kontrak Kelola, Kontrak Sewa, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Kontrak Konsesi; (3) Bentuk kemitraan berkontribusi positif yaitu bentuk kemitraan kelola, HGB, dan konsesi. Bentuk kemitraan kontrak sewa kontribusinya sedang terhadap pengembangan ekowisata. Faktor lokasi dan kepemilikan lahan sangat mempengaruhi interaksi dengan seluruh aspek kepariwisataan, khususnya penerimaan pendapatan yang rendah dibandingkan pelaku wisata lain.</p>

Dari tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan antara lain seperti berikut:

- a. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulil Amri Syam (2016) dengan judul penelitian Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng memiliki persamaan terkait Kemitraan dan Kelompok Masyarakat dalam

Pengelolaan Objek Wisata namun, perbedaan dari penelitian tersebut ialah objek wisata yang dilakukan penelitian terdahulu yaitu di Objek Wisata Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu di Pantai Kuning Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

- b. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sony Setyo Nugroho (2019) dengan judul Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara memiliki persamaan tentang kemitraan dalam pengelolaan pariwisata sedangkan perbedaannya yaitu pola kemitraan yang dilakukan hanya kepada stakeholder saja sedangkan penelitian yang penulis lakukan kemitraan Bersama swasta, pemerintah dan masyarakat.
- c. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bakti Hidayat (2018) dengan judul Model Kemitraan Untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Objek Wisata di Wilayah Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Ayah memiliki persamaan tentang model kemitraan sedangkan perbedaannya yaitu objek wisata kemitraan yang dilakukan di wilayah pesisir pantai selatan kecamatan Ayah sedangkan penulis melakukan objek wisata di Pantai Kuning Kab. Bulungan Kalimantan Utara.
- d. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Made Arie Wahyuni (2017) dengan judul Studi Kemitraan Desa Adat Dengan Pelaku Usaha Wisata Untuk Pengembangan Ekowisata Lovina di Kabupaten Buleleng memiliki persamaan tentang model penelitian yang dilakukan yaitu studi

kemitraan yang tentunya memiliki persamaan dalam metodologi penelitiannya sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek dan model kemitraan yang hanya dilakukan bersama pelaku usaha saja tidak melibatkan pemerintah atau masyarakat umum.

2.3. Kajian Teoritis

2.3.1. Konsep Kemitraan

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok.

Sulistiyani (2004) ada berbagai pengertian kemitraan secara umum meliputi:

- a. Kemitraan *Partnership*, Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan komunitas (masyarakat) maka pemerintah berperan menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat, serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri kemitraan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan usaha, dan memperoleh ruang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan.
- b. Kemitraan *Linear Collaborative*, Dalam kemitraan ini, tidak membedakan besaran volume, status/legalitas, atau kekuatan para

pihak, namun tekanan utama adalah kesamaan visi dan misi.

Hubungan terjadi pada garis lurus dan tidak saling ter subordinasi.

- c. Kemitraan mutualistik, Dalam Kemitraan ini persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yakni untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama secara optimal.

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat di terjemahkan pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

- a. Prinsip-Prinsip dan Tujuan Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dan tujuan dalam pelaksanaannya, wibisono (2007), yaitu:

- 1) Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*) pendekatannya bukan top down atau buttom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati dan saling

percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

- 2) Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
- 3) Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah untuk membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- 2) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- 3) Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan usaha kecil

- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional
- 5) Memperluas lapangan kerja
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

b. Pola-Pola Kemitraan

Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal karna dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan di dasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut wibisono (2004), kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas atau kelompok masyarakat dapat mengarah pada tiga pola, di antaranya:

- 1) Pola kemitraan kontra produktif. Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar besarnya. Focus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau kelompok masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja,

misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.

2) Pola kemitraan semi produktif. Dalam scenario ini pemerintah dan komunitas atau kelompok masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan sense of belonging di pihak masyarakat dan low benefit dipihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau public relation, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (self interest) perusahaan, bukan kepentingan bersama (common interest) antara perusahaan dengan mitranya.

3) Pola kemitraan produktif. Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma common interest. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini.

Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan biasa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan resource based partnership dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari shareholders. Sebagai contoh, mitra memperoleh saham melalui stock ownership program.

2.3.2. Konsep Pengelolaan Pariwisata

a. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus umum bahasa Tidak memberikan pengertian pengelolaan sebagai berikut :

- 1) (1) Proses, Cara, Perbuatan mengelola, (2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
- 2) Manajemen adalah Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan- kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana

b. Pengertian Pariwisata

Menurut Pitana I Gede, dkk (2009) secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafka ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata adalah suatu kegiatan kemanusiaan berupa hubungan antar orang baik dari negara yang sama atau antarnegara atau hanya dari daerah geografis yang terbatas. Di dalamnya termasuk tinggal untuk sementara waktu di daerah lain atau negara lain atau benua lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan kecuali kegiatan untuk memperoleh penghasilan,

meskipun pada perkembangan selanjutnya batasan “memperoleh penghasilan” masih kabur.

The Association Internationale des Experts Scientifique tidak Tourisme (AIEST) mendefenisikan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan pertinggalan (stay) para pendatang, namun yang dimaksud pertinggalan bukan berarti untuk bermukim tetap (Hunzeiker & Krapf, 1942).

Menurut Gunawan, M.P. dalam Santoso (2000:115) mengemukakan bahwa pengertian pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang ke dan tinggal di tempat lain di luar lingkungan tempat tinggalnya untuk waktu kurang dari satu tahun terus-menerus, dengan maksud bersenang-senang, berniaga dan keperluan-keperluan lainnya.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil suatu pengertian pariwisata yaitu suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu dalam kurun waktu tertentu dan bukan mencari nafkah.

Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata jika memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu :

- 1) Harus bersifat sementara.

2) Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi paksaan.

3) Tidak bekerja yang menghasilkan upah atau bayaran.

Kepariwisataan adalah fenomena politik-sosial-ekonomi-budaya- fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan.

Menurut Undang-Undang Tidak 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat.

Batasan yang lebih bersifat teknis dikemukakan oleh Prof. Hunziker dan Prof. K. Krapf, dua guru besar Swiss yang merupakan bapaknya ilmu pariwisata yang terkenal, dimana batasan yang diberikannya berbunyi sebagai berikut: Kepariwisataan adalah keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendalaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendalaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu.

Berikut ini adalah beberapa jenis- jenis pariwisata menurut Yoeti (2001):

- 1) Wisata Agro ; ragam pariwisata baru yang dikaitkan dengan industri pertanian, misalnya wisata durian pada saat musim durian, atau wisata tani, yakni para wisatawan turun terjun aktif menanam padi dan memandikan kerbau di sungai.
- 2) Wisata Belanja ; dilakukan karena kekhasan barang yang ditawarkan atau bagian dari jenis pariwisata lain, misalnya bandung dengan pusat Jins di Jl. Cihampelas, Sidoarjo dengan pusat Tas di Tanggulangin.
- 3) Wisata Budaya ; berkaitan dengan ritual budaya yang sudah menjadi tradisi misalnya mudik lebaran setahun sekali atau ada peristiwa budaya yang digelar pada saat-saat tertentu, misalnya : Sekaten di Surakarta dan Tidak, Ngaben di Bali, Labuhan di Cilacap, pemakaman jenazah di Tana Toraja.
- 4) Wisata Iklim ; bagi negara beriklim empat, pada saat tertentu benar- benar dilakukan untuk melakukan perjalanan mengunjungi tempat- tempat lain hanya untuk ‘berburu’ panas sinar matahari. Begitu juga untuk masyarakat tropis seperti Tidak, penduduk kota pantai berwisata ke pegunungan dan sebaliknya.

- 5) Wisata Karya ; jenis pariwisata yang para wisatawannya berkunjung dengan maksud Dinas atau tugas-tugas lain, misalnya : peninjauan/inspeksi daerah, sigi lapangan.
- 6) Wisata Kesehatan ; berhubungan dengan maksud penyembuhan suatu penyakit.
- 7) Wisata Konvensi atau Seminar ; dilakukan dengan sengaja memilih salah satu daerah tujuan wisata (DTW) sebagai tempat penyelenggaraan seminar dikaitkan dengan upaya pengembangan DTW yang bersangkutan.
- 8) Wisata Niaga ; berkaitan dengan kegiatan perniagaan(usaha perdagangan). Wisatawan datang karena ada urusan perniagaan di tempat tersebut, misalnya mata niaga atau tempat perundingan niaga ada disana.
- 9) Wisata Olahraga ; yakni mengunjungi peristiwa penting di dunia olahraga, misalnya pertandingan perebutan kejuaraan, Pekan Olahraga Nasional, Asean Games, Olimpiade, atau sekedar pertandingan persahabatan.
- 10) Wisata Pelancongan/Pesiar/Pelesir/Rekreasi ; dilakukan untuk berlibur, mencari suasana baru, memuaskan rasa ingin tahu, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, melepaskan ketegangan (lepas dari kesibukan kerja rutin).

- 11) Wisata Petualangan ; dilakukan lebih ke arah olahraga yang sifatnya menantang kekuatan fisik dan mental para wisatawan.
- 12) Wisata Ziarah ; dalam kaitan dengan agama dan budaya. Mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah pada waktu tertentu, misalnya : waisak di kompleks candi borobudur – Magelang, menyepi di pantai parangkusumo – Tidak, mengunjungi tempat yang dianggap keramat, ziarah ke makam tokoh-tokoh masyarakat atau pahlawan bangsa.
- 13) Darmawisata ; perjalanan beramai-ramai untuk bersenang-senang, atau berkaitan dengan pelaksanaan darma di luar ruangan, atau ekskursi; atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar waktu kerja sehari-hari.
- 14) Widiawisata (pendidikan) ; perjalanan ke luar (daerah, kampung) dalam rangka kunjungan studi; dilakukan untuk mempelajari seni budaya rakyat, mengunjungi dan meneliti cagar alam dan atau budaya atau untuk kepentingan ilmu selama waktu tertentu, misalnya tugas belajar.

c. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai social yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta

bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal . Menurut Cox (1985) dalam Pitana (2009) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- 2) Preservasi, proteksi, dan meningkatkan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- 3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal
- 4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- 5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di samping itu, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip- prinsip keseimbangan antar berbagai elemen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Prinsip-

prinsip keseimbangan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1) Pembangunan versus konversi

Pariwisata tidak hanya menyangkut bagaimana membangun dan mengelola suatu kawasan menjadi objek wisata, namun pengelolaannya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan proteksi baik terhadap aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan dan konservasi menjadi factor yang esensial bagi keberlanjutan pariwisata

2) Penawaran versus permintaan

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Penawaran mewakili produk pariwisata seperti taman wisata alam, akomodasi dengan gaya lokal , eko-tur, sarana rekreasi, aktivitas budaya, dan sebagainya. Sedangkan permintaan mengacu kepada pasar pariwisata, yaitu wisatawan tipe apa yang akan disasar, berapa jumlah yang akan berwisata, di mana mereka akan menginap, berapa uang yang akan mereka keluarkan, kegiatan menarik apa yang akan mereka lakukan, dan sebagainya. Menyeimbangkan penawaran dan permintaan merupakan salah satu kunci untuk tetap suksesnya pariwisata.

Penekanan salah satu atas lainnya akan membawa masalah di masa yang akan datang.

3) Keuntungan versus biaya

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan dan memastikan bahwa ada keseimbangan distribusi keuntungan (*benefit*) dan biaya (*cost*). Hal ini menyangkut pengembalian investasi yang cukup, pengalokasian fee untuk mengatasi dampak aktifitas pariwisata, pengembalian yang optimal atas biaya sosial, ekonomi dan budaya bagi penduduk lokal, insentif dan besaran pajak yang wajar. Dalam rangka menciptakan pengelolaan pariwisata yang mampu membiayai diri sendiri (*economically self-sufficient*) perlu disusun kebijakan tidak dan fiscal yang wajar, disamping juga harus memperhatikan factor non ekonomi seperti, biaya dan keuntungan sosial dan lingkungan. Keseimbangan pengelolaan keuntungan dan biaya menjadi salah satu penentu keberlanjutan pariwisata.

4) Manusia versus lingkungan

Tantangan pengelolaan pariwisata dalam mencari keseimbangan antara traditional ways dengan modern practices. Di beberapa kawasan wisata, penduduk lokal kadang belum atau bahkan tidak menerapkan metode konservasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal itu mungkin disebabkan oleh ketersediaan sumber daya

yang melimpah di masa lalu. Cepat atau lambat kondisi itu tidak akan dapat bertahan mengingat pertumbuhan penduduk yang begitu cepat yang secara alami akan memerlukan ruang dan sumber daya untuk hidup dan penghidupannya. Keberagaman peristiwa dapat diarahkan sebagai wahana penyeimbang antara kepentingan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Pariwisata hendaknya menyediakan metode untuk mengelola lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan konservasi, pembaharuan sumber daya alam, daur ulang, dan sebagainya. Tentu saja usaha pelestarian lingkungan ini bisa berjalan jika sejalan dengan tata nilai dan norma yang dianut komunitas lokal. Melalui proses pendidikan dan pembelajaran dapat diusahakan perubahan perilaku dan kebiasaan komunitas lokal yang merugikan lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan, penghancuran terumbu karang dan perusakan pantai, pembalakan liar, pengambilan sumber daya yang melebihi kapasitas normal, serta praktik-praktik tradisional yang merugikan lainnya. Sebaliknya penekanan dan penguatan atas nilai-nilai lokal yang mendukung kelestarian lingkungan perlu diakui.

2.3.3. Konsep Masyarakat

Soekanto (1982), masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Taneko (1984), mengemukakan beberapa ciri-ciri suatu masyarakat :

a. Manusia Hidup Bermasyarakat

Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya. Oleh itu, seseorang yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicerminkan dan mencerminkan masyarakatnya. Kegigihan individu Jepun dikaitkan dengan kegigihan masyarakatnya. Maka, kajian terhadap masyarakat itu menjadi penting kerana melaluinya, kita dapat memahami manusia secara keseluruhan.

b. Memahami Cara Hidup Bermasyarakat

Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkah laku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Iini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud di dalam lingkungan sosialnya.

c. Memahami budaya dan masyarakat lain

Individu yang telah mengkaji masyarakat lain tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud. Seseorang yang mengkaji masyarakat industri tidak akan terkejut jika pergi ke negara tersebut.

d. Memupuk kerjasama di antara masyarakat

Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. Bagi mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya, memerlukan kerjasama antara masyarakat. Maka, kajian terhadap masyarakat akan membolehkan kita memahami dan memupuk kerjasama dengan sesuatu masyarakat.

Adapun unsur-unsur suatu masyarakat, yaitu:

a. Manusia Yang Hidup Berkelompok

Manusia ialah mereka hidup bersama dan membentuk kelompok. Kelompok ini lah yang membentuk masyarakat. Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantung. Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia ini. Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain. Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan melahirkan kebudayaan, sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Budaya itu pula

diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan proses penyesuaian.

b. Mengalami perubahan

Sebagaimana budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu.

c. Berinteraksi

Salah satu syarat kewujudan masyarakat ialah terdapatnya perlakuan berhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan. Komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain.

d. Terdapat Kepimpinan

Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Dalam masyarakat Melayu awal, kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan.

e. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya atau merujuk kepada susun lapis masyarakat. Stratifikasi sosial boleh dibahagikan kepada tiga

bahagian iaitu kelas, status dan kasta. Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin, kelas bawahan.

Sejalan dengan pemahaman masyarakat di atas maka menurut teori siberetik tentang *General System Of Action*, Ankie M.M (1985) menjelaskan bahwa suatu masyarakat akan dapat dianalisis dari sudut syarat-syarat fungsionalnya yaitu:

a. Fungsi mempertahankan pola (*Pettern Maintenance*)

Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem kebudayaan. Hal itu berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat, oleh kerana diorientasikan realitas yang terakhir.

b. Fungsi integrasi

Yang mana mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusinya pada organisasi dan peranannya dalam keseluruhan sistem.

c. Fungsi pencapaian tujuan (*Goal Attaindment*)

Hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat,

mobilisasi warga masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

d. Fungsi adaptasi

Yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisik organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi- kondisi dari lingkungan hidupnya.

Linton (1968) Kelompok Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan social, yang di dalamnya terdapat tiga kriteria kelompok, yaitu:

- a. Ada atau tidaknya organisasi
- b. Ada atau tidaknya hubungan sosial di antara warga kelompok
- c. Ada atau tidaknya kesadaran jenis di antara orang-orang yang ada dalam kelompok dimaksud.

Berdasarkan analisis menggunakan tiga kriteria tersebut dalam masyarakat dikenal beberapa jenis atau macam kelompok, yaitu:

- a. Asosiasi. Asosiasi merupakan kelompok yang memenuhi tiga kriteria Bierstedt tersebut. Suatu asosiasi atau organisasi formal terdiri atas orang- orang yang memiliki kesadaran akan kesamaan

jenis, ada hubungan sosial di antara warga kelompok dan organisasi.

- b. Kelompok Social. Kelompok yang para anggotanya memiliki kesadaran akan kesamaan jenis serta hubungan sosial di antara warganya, tetapi tidak mengenal organisasi, oleh Biersted disebut sebagai kelompok social Kelompok Kemasyarakatan.
- c. Kelompok kemasyarakatan merupakan kelompok yang berisi orang-orang yang memiliki kesadaran jenis saja, tidak ada hubungan sosial di antara orang-orang tersebut maupun organisasi disebut sebagai kelompok kemasyarakatan (societal groups). Misalnya kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Orang sadar sebagai sesama laki-laki atau sesama perempuan, namun tidak ada organisasi ataupun komunikasi di antara mereka.
- d. Kelompok Statistik. Bentuk terakhir dari kelompok adalah kategori atau kelompok statistic, yaitu kelompok yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kesamaan jenis (misalnya jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan sebagainya), tetapi tidak memiliki satu pun dari tiga kriteria kelompok menurut Biersted.

Sebenarnya kelompok statistik bukanlah “kelompok”, sebab tidak memiliki tiga ciri tersebut. Kelompok statistik hanyalah orang-orang yang memiliki kategori statistik sama, misalnya kelompok umur (0-5 tahun, 6- 10 tahun), yang dipakai dalam data penduduk Biro Pusat Statistik. Dalam kelompok ini sama sekali tidak

ada organisasi, tidak ada hubungan antar- anggota, dan tidak ada kesadaran jenis.

2.3.4. Konsep Pemerintahan Daerah

Definisi pemerintahan daerah di dalam UU Tidak. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Tidak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tidak Tahun 1945.

Konsep pemerintahan daerah menurut Undang-undang 5 Tahun 1974 mengacu pada suatu organisasi pemerintahan berbasis wilayah dan penduduk tertentu yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan yang telah diserahkan kepadanya oleh pemerintahan di atasnya. Dan yang terbaru merujuk pada Undang-undang 32 Tahun 2004 dan Undang- undang 12 Tahun 2008. Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 7, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Tidak. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini juga

berarti bahwa daerah akan menjadi lebih eksis jika mampu benar benar mengelola dan me-manage sumberdaya yang dimiliki.

a. Peran Pemerintah Daerah

Melaksanakan tugas pembangunan sangat penting dan merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat dan bukan hanya pemerintah semata-mata. Akan tetapi, meskipun demikian harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Adapun peran pemerintah dalam kegiatan pembangunan, yaitu antara lain (Siagian, 2007) :

1) Selaku Stabilisator

Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai stabilisator dalam berbagai bidang pembangunan, yaitu antara lain bidang politik, ekonomi, dan bidang sosial budaya. Peran pemerintah dalam bidang politik adalah menjamin bahwa kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Rongrongan politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa pertentangan yang tidak henti-hentinya antara berbagai kekuatan politik, apalagi yang didasarkan pada perbedaan ideologi yang tajam. Bentuk lain dapat berupa timbulnya kekuatan oposisi yang hanya mementingkan partainya sendiri, meskipun hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Rongrongan dari luar biasanya

datang dari negara-negara kuat dan adikuasa yang ingin memantapkan pengaruhnya dan bahkan memperluas hegemoninya. Artinya ingin agar lingkungan pengaruh makin melebar yang antara lain berupa panutan ideologi dan sistem politik yang berlaku di Negara kuat tersebut yang diinginkannya agar diterapkan di lingkungan makin banyak negara yang akan diakui sebagai sekutunya. Kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan tidak akan dapat berlangsung dengan mantap tanpa adanya stabilitas politik. Dalam bidang ekonomi pemerintah diharapkan untuk dapat menjamin kondisi stabilitas ekonomi yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasies industrialisasi berlangsung dengan baik, dan kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kehidupan nasional. Bidang sosial budaya, pemerintah diharapkan dapat menjadi Negara dan bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya. Harus diakui bahwa pembangunan sosial budaya seolah-olah mengandung dilema karena di satu pihak ada unsur- unsur budaya yang harus dipertahankan, akan tetapi di lain pihak bangsa yang bersangkutan harus siap

menerima perubahan yang dituntut oleh kehidupan modern. Mempertahankan jati diri memang sangat penting karena dalam jati diri itulah kekhasan suatu bangsa diketahui, dikenali dan diakui oleh pihak atau bangsa lain. Peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan berbagai cara, yaitu antara lain kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan persuasif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

2) Selaku inovator

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru seperti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir yang baru.

3) Selaku modernisator

Melalui pembangunan setiap negara menginginkan menjadi negara yang modern. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan antara lain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki, sistem pendidikan nasional yang

handal, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan, pemberdayaan rakyat, kesediaan mengambil risiko, orientasi masa depan, dan bersedia menerima perubahan. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menuntun masyarakatnya ke arah kehidupan modern seperti itu. Proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah sendiri.

4) Selaku pelopor

Pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain bahwa selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Kepeloporan yang dapat diberikan pemerintah misalnya kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik- baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin, kepeloporan dalam penegakan disiplin, kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundangundangan dan sebagainya.

5) Selaku pelaksana sendiri

Meskipun pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti

keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bias diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Sebagaimana peran pemerintah tersebut sebagai stabilisator, inovator, pelopor, dan pelaksana sendiri, pembangunan nasional harus diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi seluruh elemen pemerintah dengan ideal atau sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terjadi keseimbangan dan gerak yang dinamis dalam roda pemerintahan yang baik.

b. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Daerah

Dalam kamus Bahasa menyebutkan pengertian peran adalah :

- 1) Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- 2) Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- 3) Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan "pe" menjadi kata

”pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Dalam kata dasar ”perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat,
- b) Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya,
- c) Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah,
- d) Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan beberapa model kemitraan, tidak berjalan semudah yang dibayangkan, akan selalu ada penghambat dan pendukung yang menyertai pelaksanaannya, dan pendukung lebih banyak daripada penghambatnya maka pelaksanaan pengelolaan akan lebih cepat, dan begitupun sebaliknya. Ketika pengelolaan yang dilakukan berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah meningkatnya jumlah wisatawan yang ada di objek wisata Pantai Desa Tanah Kuning dan akhirnya akan berimbas kepada pendapatan daerah dan itu menandakan keberhasilan pengelolaan yang

dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan objek wisata, khususnya Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan.

Sulistiyani (2004) ada berbagai pengertian kemitraan secara umum meliputi:

1) *Partnership*

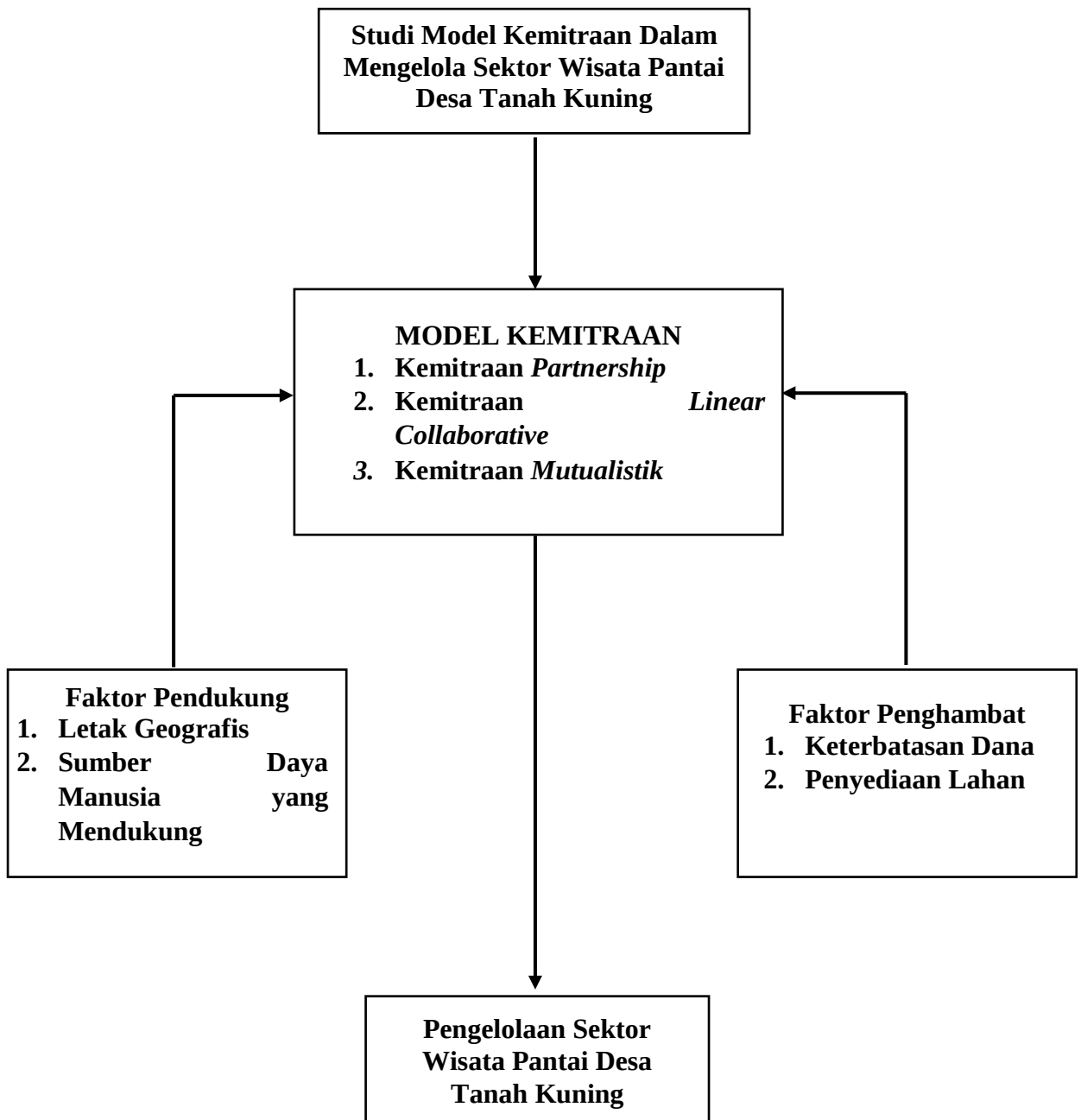
Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan komunitas (masyarakat) maka pemerintah berperan menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat, serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri kemitraan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan usaha, dan memperoleh ruang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan.

2) *Linear Collaborative*

Dalam kemitraan ini, tidak membedakan besaran volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak, namun tekanan utama adalah kesamaan visi dan misi. Hubungan terjadi pada garis lurus dan tidak saling ter subordinasi.

3) *Mutualistik*

Dalam Kemitraan ini persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yakni untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama secara optimal.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Topik yang diteliti tentang model kemitraan dalam pengelolaan objek wisata pantai desa tanah kuning, yang dinilai dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dalam upaya aktualisasi data dan informasi serta realisasi kebijakan dapat dilihat di beberapa kabupaten/kota terutama dapat terungkap di daerah yang dijadikan sampel dinilai terhadap daerah lain di Kabupaten Bulungan. Lokasi yang menjadi sampel yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dan objek Pantai Wisata Desa Tanah Kuning yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, yang berlangsung dari bulan Februari sampai dengan April tahun 2023.

3.2. Jenis Penelitian

Disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas penulis yang menyangkut studi kasus mengenai kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan kiranya lebih menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur atau bentuk hitungan lainnya. Selain, pemilihan dan penggunaan desain ini terkait

dengan tujuan penelitian untuk menggambarkan dengan menghimpun kemudian menganalisis berbagai fakta dan data terkait sejauh mana SDM atau Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dalam mengelola objek wisata Pantai Desa Tanah Kuning.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode wawancara dan observasi lapangan dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan pejabat struktural dan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan. Adapun jenis penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, maupun data dokumentasi dan studi kepustakaan (Sugiyono, 2017:252).

3.3. Data dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:187). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen misalnya foto dan data statistik. Sumber data dari penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, bukti-bukti dapat datang dari enam sumber, yakni: dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pameran serta perangkat fisik. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang akan diperoleh secara langsung dari informan kunci berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan melakukan

wawancara (*interview*) dengan beberapa pejabat struktural dan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bulungan seperti Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 55 tentang Kepariwisata, PP RI 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.4. Fokus Penelitian

Untuk memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian, maka diuraikan beberapa deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Kemitraan pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan objek pariwisata pantai Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan.
- b. Kemitraan Partnership. Dalam hubungan kemitraan ini pemerintah yakni semua jajaran atau SKPD yang terkait dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning ini berperan atau bekerja sama dalam menyusun kebijakan, memberikan penyuluhan atau pengarahan, kemampuan dan keterampilan yang memihak kepada kepentingan Kelompok Masyarakat (Laskar Kebersihan), serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik..

- c. Kemitraan Linear Collaborative. Dalam kemitraan ini, pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) tidak membedakan besaran volume, status/legalitas, dari SKPD tidak terkait lainnya ataupun dari kekuatan para pihak lainnya, namun tekanan utamanya adalah kesamaan visi dan misi dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning.
- d. Kemitraan mutualistik. Dalam kemitraan ini pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berperan serta dalam proses pengelolaan, dengan menyiapkan sarana untuk berjualan.
- e. Faktor Pendukungnya dalam hal ini, letak geografis dan sumber daya manusia yang mendukung dan juga letak Pantai Desa Tanah Kuning yang berada di pesisir Kabupaten Bulungan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer, sedangkan data sekunder hanya digunakan sebagai pelengkap analisis data primer tersebut. Peneliti tidak terlibat dalam mengusahakan dana penelitian lapangan, merekrut dan melatih pewawancara, menentukan sampel dan mengumpulkan data di lapangan yang banyak memakan energi dan waktu. Peneliti menggunakan teknik aksidental yaitu siapa yang ditemui saat penelitian, maka itu yang dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2017:77).

- a. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan narasumber yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai

hal yang menyangkut kebijakan dan pelaksanaan kepariwisataan di Kabupaten Bulungan. Pertanyaan yang disampaikan penulis secara lisan dan terstruktur, agar fokus pembicaraan terarah kepada pengungkapan masalah kepariwisataan serta kalsifikasi data sekunder.

- b. Observasi, penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian untuk melihat aktifitas sesungguhnya yang dilakukan para pegawai Dinas Pariwisata, serta pengelola wisata di Objek yang dijadikan sampel.
- c. Studi dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literature dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kepariwisataan. Studi ini menambah kejelasan dalam membahas secara rinci dan ada korelasinya dengan permasalahan dihadapi oleh kepariwisataan di Kabupaten Bulungan.

3.6. Uji Validitas Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2017:83).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara msengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu di uji kekuatan atau tidak akuratanya.

c. Triangulasi Waktu.

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisis dapat tersebut diberi makna dan arti yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Analisis data adalah proses yang mengorganisasikan, mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Pilihan alternatif kebijakan yang terbaik yang dapat mencapai tujuan dengan efektif dan realistis dapat dilaksanakan sangat tergantung pada hasil analisis pemilihan beberapa alternatif kebijakan (Sugiyono, 2017:165).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2017:166) :

a. Editing

Editing adalah meneliti kembali catatan setelah kembali dari lapangan. Data-data diperoleh, dikumpulkan, direduksi, dipilih, kemudian data yang relevan dirangkum dengan permasalahan peneliti.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu mengelompokkan data-data sesuai dengan masalah yang diteliti. Langkah ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dapat dikelompokkan sehingga merefleksikan permasalahan yang ditentukan.

c. Tabulasi Data

Tabulasi data yaitu menggolongkan data ke dalam kelompok – kelompok sehingga penelitian menjadi lebih terarah.

d. Intrepretasi

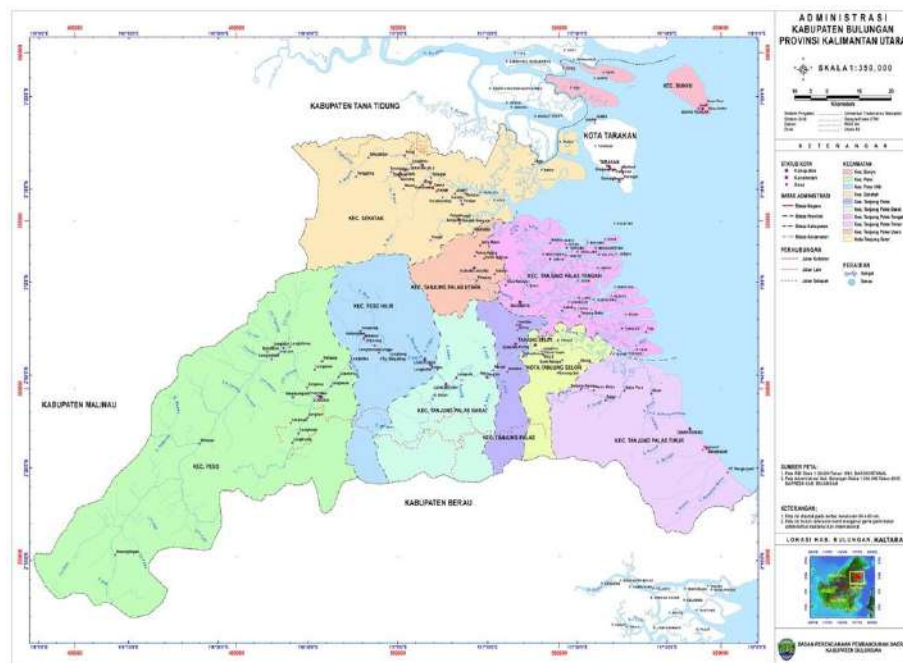
Intrepretasi yaitu mencari data yang lebih luas dari data yang ada diolah bersamaan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dihubungkan dengan teori ilmu pengetahuan yang berkorelasi dengan hal dimaksud.

BAB IV

4.1. Hasil Penelitian

Secara astronomis, Bulungan terletak antara 20 09' 19" - 30 34' 48" Lintang Utara dan 1160 04' 41" - 1170 57' 56" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bulungan memiliki batas-batas yaitu;

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan
- Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau.



Sumber : BPS Bulungan, 2023

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Bulungan

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit- bukit, bergunung - gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. Kabupaten Bulungan terdiri dari 10 kecamatan, 7 kelurahan, dan 74 desa. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 130.383 jiwa dengan luas wilayah 13.925,72 km². Daftar kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Peso
- b. Kecamatan Peso Hilir / Peso Ilir
- c. Kecamatan Pulau Bunyu
- d. Kecamatan Sekatak
- e. Kecamatan Tanjung Palas
- f. Kecamatan Tanjung Palas Barat
- g. Kecamatan Tanjung Palas Tengah
- h. Kecamatan Tanjung Palas Timur
- i. Kecamatan Tanjung Palas Utara
- j. Kecamatan Tanjung Selor

4.1.1. Profil Desa Tanah Kuning

Desa Tanah Kuning adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Konon nama tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja karena tanahnya yang kuning terlihat dari jauh dimana wilayah tersebut masih hutan dan hampir belum terjamah oleh manusia. Desa Tanah Kuning sendiri

adalah sebuah desa hasil pemekaran dari Desa Mangkupadi. Desa tanah kuning berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Tanjung Sepikat Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- b. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desai Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Luas wilayah Desa Tanah Kuning adalah $\pm$ 20.000 Ha dimana 65% berupa daratan yang bertopografi berbukit - bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan perkebunan sawit dan untuk persawahan tadah hujan. Jarak dari kota Tanjung Selor ke Desa Tanah Kuning adalah 86 Km dengan letak koordinat daerah pantai / pegunungan 117^o,43”- 40,42^o Bujur Timur. Iklim Desa Tanah Kuning, sebagaimana daerah - daerah lain di wilayah Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Berdasarkan kondisi geografis di atas dapat dijelaskan bahwa Desa Tanah Kuning merupakan wilayah pesisir pantai dikarenakan batas langsung desa di sebelah timurnya ialah Laut Sulawesi. Hal ini

berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk di Desa Tanah Kuning. Selain menjadi petani, masyarakat di Desa Tanah Kuning sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Desa Tanah Kuning mempunyai jumlah penduduk 2.843 jiwa, yang terdiri dari laki - laki yang berjumlah 1.540 jiwa dan perempuan yang berjumlah 1.303 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 697 KK, yang terbagi dalam 11 (sebelas) wilayah RT dan 3 (tiga) wilayah RW.

Desa Tanah Kuning memiliki potensi wisata pantai yang menarik. Objek wisata pantai ini mengandalkan pantai berpasir putih dan keindahan pemandangan laut sebagai daya tarik wisata. Lokasi objek wisata ini dapat ditempuh dengan jalur darat dengan waktu tempuh 2 jam 24 menit atau jalur air menggunakan speedboat, perjalanan dari Tanjung Selor ke pantai ini memakan waktu sekitar ± 1 jam. Pantai Tanah Kuning memiliki lebar ± 75 m dengan panjang ± 2 km. kegiatan sehari - hari warga Desa Tanah Kuning adalah bekerja sebagai nelayan bagan tangkap dan nelayan udang rebon. Disekitar tepian pantai dijadikan tempat transaksi jual beli ikan antara warga desa dan nelayan bagan tangkap. Pada saat hari libur warga dari luar daerah (Tanjung Selor, Sajau, Binai, dll) akan datang ke Desa Tanah Kuning untuk menikmati liburan ada yang datang bersama keluarga untuk rekreasi dan ada juga yang datang untuk memancing di sekitar dermaga pantai untuk menghabiskan akhir pekan mereka.

4.1.2. Model Kemitraan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan

a. Kemitraan *Partnership*

Dalam hubungan kemitraan ini pemerintah yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata beserta semua instansi pemerintah yang terkait dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning dan kelompok masyarakat ini berperan atau bekerja sama dalam menyusun kebijakan, memberikan penyuluhan atau pengarahan, kemampuan dan keterampilan yang memihak kepada kepentingan Kelompok Masyarakat.

1) Mengeluarkan Kebijakan Pengembangan Pariwisata yang Mencakup Kebijakan Pokok Pengelolaan Pariwisata

Objek wisata yang ingin dijadikan sebagai objek wisata unggulan, dalam pengelolaannya harus ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai pengelola agar pengelolaannya dapat berjalan sesuai yang diinginkan, dan mencapai target. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai fasilitator dan regulator pengembangan pariwisata.

“...Kemampuan dan keterampilan aparatur harus ditingkatkan agar dalam tugasnya dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan tugas yang mereka emban masing-masing”

(Wawancara dengan Ibu Maria, tanggal 13 Juni 2023).

Melihat hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur dan pemberdayaan tugas dan fungsinya sangat bagus untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka pengelolaan objek wisata Pantai Desa Tanah Kuning.

- 2) Pola kerja sama antara pihak Pariwisata, Bapeda, dan Instansi lain yang terkait dalam pengelolaan kebersihan pantai desa tanah kuning.

Objek wisata yang baik dan unggulan, dalam pengelolaannya harus ada kerjasama antara pemerintah, dalam hal ini dinas Pariwisata, Bapeda, dan instansi terkait dalam pengelolaan kebersihan dan keasrian di Pantai desa tanah kuning agar pengelolaannya dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Seperti yang dikemukakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan berikut:

“...Jadi pemerintah kabupaten Bulungan di dalam melakukan kerja sama itu senantiasa memiliki komitmen untuk selalu bersinergi baik antara Dinas Pariwisata, Bapeda maupun dinas-dinas yang lainnya, jadi pemerintah kabupaten Bulunganitu adalah satu time work atau satu kesatuan sehingga di dalam menyelenggarakan kegiatan kebersihan, pariwisata dan lainnya. Artinya jika kami memiliki suatu

permasalahan semua komponen, kepala SKPD atau dinas tertentu pasti turun tangan, jadi sinergitas yang di turunkan oleh Bupati ini kepada setiap SKPD, senantiasa melahirkan sebuah time work yang kuat dan itu adalah sistem.”

(Wawancara dengan Ibu Maria, tanggal 13 Juni 2023).

Senada dengan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, yang mengatakan bahwa:

“...Jadi, dari segi administratif keuangan di lakukan langsung oleh pihak Bapeda, jadi penggajiannya, jaminan kerjanya, itu Bapeda yang menangani. Tapi persoalan - persoalan pembinaannya, baik yang melakukan sebagai petugas kebersihan maupun masyarakat yang menikmati obyek wisata itu adalah perannya pariwisata”

(Wawancara dengan Bapak Anwar, tanggal 13 Juni 2023).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal ini dinas-dinas, instansi dan kepala SKPD senantiasa bersinergitas atau bekerja sama untuk membentuk suatu *time work* yang kuat dalam menyelesaikan suatu permasalahan seperti halnya dalam pembangunan objek wisata Pantai Desa Tanah Kuning, dan disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan kerja sama terhadap SKPD terkait agar lebih cepatnya pembangunan yang dilakukan. Serta harus ada kerjasama yang baik antara SKPD terkait tersebut.

b. Kemitraan *Linear Collaborative*

Dalam kemitraan ini, tidak membedakan besaran volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak, namun tekanan utama adalah kesamaan visi dan misi. Hubungan terjadi pada garis lurus dan tidak saling ter subordinasi. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya-upaya seperti berikut ini:

- 1) Program baru Pemerintah menyangkut para Petugas Kebersihan dalam menjaga kebersihan di Pantai Tanah Kuning.

Seperti yang dikemukakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan berikut:

“...Upaya-upaya yang kita luncurkan adalah senantiasa memberikan hadiah kepada petugas kebersihan yang memiliki prestasi lebih dari para petugas yang lainnya, bahkan Bapak Bupati senantiasa memberikan hadiah bagi para pegawai kebersihan yang memiliki prestasi lebih, upaya lainnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya nilai kebersihan sehingga Insyaallah kedepan masyarakat akan semakin sadar untuk mencintai kotanya dan menjadikannya semakin bersih dan secara tidak langsung pemerintah telah memberdayakan masyarakat”

(Wawancara dengan Ibu Maria, tanggal 13 Juni 2023).

Masih Senada dengan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, yang mengatakan bahwa:

“...Di sinilah peran dari dinas pariwisata, tetap melakukan pembinaan dan sosialisasi menyangkut tentang arti pentingnya menjaga kebersihan, agar kebersihan itu tumbuh dan berkembang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dari segi

kesadarannya” (wawancara dengan Bapak Anwar, tanggal 13 Juni 2023).

Dari hasil wawancara yang dilakukan menegaskan bahwa Pemerintah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan telah melakukan banyak upaya sosialisasi bahkan memberikan pembinaan, pemberdayaan, ataupun penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan. Dan secara tidak langsung masyarakat telah membantu para petugas kebersihan dalam menjaga keindahan, keasrian dan pastinya kebersihan dari Pantai Desa Tanah Kuning itu sendiri.

2) Pihak Kepala Desa Tanah Kuning

a) Peran yang dijalankan dari pihak Desa menyangkut dalam pengelolaan objek pariwisata Pantai Tanah Kuning dapat di ketahui dari hasil wawancara Kepala Desa Tanah Kuning berikut:

*“...Jadi, pengurus desa dalam hal ini men-support apa-apa yang sudah ditetapkan atau yang direncanakan oleh kepala-kepala atau kantor-kantor dinas yang berkompetensi atau berkaitan dengan Pantai Tanah Kuning itu”
(Wawancara dengan Bapak Budi Rahman, 14 Juni 2023).*

Dari hasil wawancara di atas menegaskan bahwa pihak Desa senantiasa mendukung apa-apa saja yang telah menjadi agenda atau yang telah direncanakan oleh kepala-kepala

dinas yang berkompetensi atau berkaitan dalam pengembangan atau pembangunan Pantai Tanah Kuning.

b) Kerjasama tertentu dari pihak kelurahan dengan para pengelola Pantai Tanah Kuning dan para petugas kebersihan dapat diketahui dari hasil wawancara Kepala Desa Tanah Kuning berikut:

“...Jadi, sehubungan dengan yang tadi, kantor desa sebagai penanggung jawab umum, jadi dalam hal kerja sama ini apa yang sudah dicanangkan atau ditetapkan sebagai program kerja oleh Bappeda maupun Dinas Pariwisata itu kita support dan membantu memelihara, melihat, mengamankan, dan melaporkan kepada dinas yang bersangkutan” (Wawancara dengan Bapak Budi Rahman, 14 Juni 2023).

Dari hasil wawancara di atas menegaskan bahwa dalam hal kerjasama ini pihak Desa sebagai penanggung jawab umum senantiasa mendukung, membantu memelihara, melihat, mengamankan dan melaporkan kepada Dinas yang bersangkutan.

c) Harapan pihak desa kedepannya terhadap Pantai Tanah Kuning dan pengelolaan kebersihannya dapat diketahui dari hasil wawancara Kepala Desa Tanah Kuning sebagai berikut:

“...Jadi, harapan kami dalam hal ini ingin memanfaatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan segenap ruang lingkup pariwisata mulai dari pedagang kecil sampai pedagang-pedagang menengah yang bisa memanfaatkan potensi ekonomi di Pantai Tanah Kuning itu melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti LPM, Kemudian PNPM. Inilah sementara dalam penjajakan dan perencanaan untuk mensinergikan

bagaimana masyarakat bisa juga menikmati potensi ekonomi yang ada di Pantai Tanag Kuning ini”(wawancara dengan Bapak Budi Rahman, 14 Juni 2023).

Dari hasil wawancara di atas menegaskan bahwa untuk harapan kedepannya pihak desa ingin mensinergikan melalui organisasi kemasyarakatan dengan segenap ruang lingkup pariwisata mulai dari pedagang kecil sampai menengah bisa memanfaatkan potensi ekonomi di Pantai Tanah Kuning ini.

c. Kemitraan *Mutualistik*

Dalam Kemitraan ini, persekutuan dua pihak atau lebih yang sama - sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yakni Pemerintah melibatkan Masyarakat umum untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama secara optimal. Seperti berikut ini :

a) Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata dan pelestarian budaya.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini ialah membenahi segala sesuatu yang ada di objek wisata seperti penambahan tempat-tempat sampah, WC umum, papan informasi bagi wisatawan untuk tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata juga memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat yaitu dengan memberikan secara cuma - cuma kanopi dan membangun cafe-cafe ataupun warung makan di dalam objek wisata Pantai

Tanah Kuning tersebut. Seperti yang dikutip dari wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi berikut:

*“...Di daerah pantai tanah kuning sana pada umumnya melibatkan berbagai elemen masyarakat kecil di dalam melakukan aktifitas jual - jualan dalam hal ini adalah kuliner, sehingga dengan demikian, bahwa pengembangan dan pembinaan objek wisata di Pantai Tanah Kuning itu lebih kita arahkan kepada pembinaan wisata-wisata kuliner.
(Wawancara dengan Bapak Anwar, tanggal 13 Juni 2023).*

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan jalan yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat untuk berperan serta dalam proses pengelolaan masyarakat, dengan menyiapkan sarana untuk berdagang dengan membangun cafe-cafe ataupun warung makan di dalam objek wisata Pantai Tanah Kuning ini

a) Tokoh Masyarakat

1. Pendapat para tokoh masyarakat mengenai keberadaan para petugas kebersihan. Wawancara berikut dengan salah seorang tokoh masyarakat di sekitar Pantai Tanah Kuning.

*“...Ya,, bagi kami luar biasa karna memberi sebuah pelajaran bagi masyarakat yang biasanya membuang sampah sembarangan dan dengan adanya petugas kebersihan ini terkait dengan Dinas Kebersihan atau Bapeda itu memberikan sebuah pemahaman dan pola fikir yang bagus dan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat lagi”
(Wawancara dengan Asmar, 13 Juni 2023).*

Dari hasil wawancara di atas menegaskan bahwa dengan adanya para petugas kebersihan ini mampu membuat masyarakat sadar akan pentingnya untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat.

2. Harapan seorang tokoh masyarakat kedepannya mengenai pengelolaan kebersihan di Pantai Tanah Kuning.

“...Jadi, apa yang sudah ada pada hari ini terus dikembangkan dan diperindah lagi tempat sampahnya supaya gairah masyarakat untuk membuang sampah di tempat sampah itu memiliki daya tarik tersendiri, terus yang kedua tetap dipertahankan kalau perlu di tingkatkan kembali dengan cara menambah personil di setiap titik yang ada di kawasan-kawasan yang sifatnya seperti di tempat wisata pantai tanah kuning ini” (wawancara dengan Asmar, 13 Juni 2023).

Dari hasil wawancara di atas menegaskan bahwa harapan kedepannya dari pihak pemerintah khususnya Bapeda ataupun dari pihak Pariwisata mampu mempertahankan bahkan dikembangkan lagi agar masyarakat lebih tertarik untuk membuang sampah pada tempatnya.

4.1.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Objek Wisata

Pantai Desa Tanah Kuning

a. Faktor Pendukung

1) Letak Geografis

Letak objek wisata Pantai Desa Tanah Kuning yang dekat dengan jalan raya sehingga mudah dijangkau baik oleh pengunjung maupun pengelola yang bertugas untuk mengelola

objek wisata tersebut juga tersedia jalan setapak untuk mencapai lokasi objek wisata dari jalan raya. Hal ini ditegaskan oleh kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, beliau mengatakan bahwa:

“...Kenapa Pantai Desa Tanah Kuning sekarang kita anggap sebagai unggulan, karena di sana dekat di jalan negara, kemudian mudah dijangkau, mudah dilihat. Dari sekian banyak objek wisata yang ada di Kalimantan Utara ini.”

(Wawancara dengan Bapak Anwar, tanggal 13 Juni 2023).

Dari penjelasan di atas makin menegaskan bahwa Pantai Desa Tanah Kuning diunggulkan karena memang dekat dengan jalan raya, sehingga akses untuk menuju ke tempat wisata tersebut sangat mudah dan itu juga berpengaruh besar terhadap pengelolaannya.

2) Sumber Daya Manusia yang Mendukung

a) Kesadaran Masyarakat

Masyarakat setempat sadar bahwa objek wisata Pantai Tanah Kuning sebagai salah satu tujuan wisata yang terkenal sehingga mereka turut serta mengambil bagian seperti menjaga kebersihan di objek wisata Pantai Tanah Kuning. Selain masyarakat di sekitar objek wisata, pengelola objek wisata Pantai Tanah Kuning juga berusaha menjaga kelestarian objek wisata, seperti yang dikatakan pengelola

objek wisata Pantai Tanah Kuning dalam wawancara sebagai berikut :

“...Di objek wisata Pantai Tanah Kuning ini, kami sudah berupaya melengkapi sarana kebersihan. Kami juga mengadakan kerja bakti di dalam objek wisata ini”

(Wawancara dengan Bapak Budi Rahman, 14 Juni 2023).

Hasil wawancara di atas menegaskan masyarakat yang ada di sekitar objek wisata sangat sadar akan pentingnya kebersihan objek wisata agar mampu menarik banyak wisatawan. Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan bahwa pengelolaan pariwisata Kabupaten Bulungan tidak lepas dari peran serta masyarakat dan pengelola objek wisata itu sendiri karena untuk mencapai peningkatan kualitas kepariwisataan ini dibutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif antara pemerintah, masyarakat dan pengelola objek wisata seperti yang dikutip dalam wawancara berikut :

“...Kami sangat bangga dengan masyarakat karena mereka mendukung sepenuhnya keberadaan objek wisata Pantai Tanah Kuning dan mampu menjaga kebersihan dan kelestarian di kawasan objek wisata tersebut dan juga pengelola objek wisata. Karena mereka dengan kesadaran sendiri mau membantu untuk menjaga kebersihan di sekitar objek wisata tanpa ada perintah langsung dari pihak tertentu”
(Wawancara dengan Ibu Maria, tanggal 13 Juni 2023).

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah sangat mengapresiasi masyarakat yang ada disekitar objek wisata Pantai Desa Tanah Kuning akan kesadarannya membantu pemerintah dalam mengelola objek wisata Pantai Desa Tanah Kuning dengan selalu menjaga kebersihan objek wisata Pantai Tanah Kuning agar selalu indah.

Jadi, partisipasi aktif dari masyarakat, pengelola objek wisata dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk mendukung pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bulungan, memang sudah seharusnya dilakukan mengingat objek wisata Pantai Tanah Kuning yang ada di Kabupaten Bulungan berada dekat dengan jalan raya dan tempatnya yang strategis maka hal yang paling kecil yang bisa membantu pemerintah adalah dengan menjaga kebersihan di objek wisata Pantai Tanah Kuning tersebut agar wisatawan juga betah saat berwisata.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Dana

a) Dana dalam pengelolaan objek wisata sangat penting

Setiap objek wisata membutuhkan dana yang besar dalam pengelolaannya. Karena objek wisata harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata di objek wisata tersebut. Ketika

semua itu tidak terpenuhi, maka objek wisata tersebut tidak akan banyak peminatnya. Dan ini yang menjadi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning. Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa:

”...Masalah keterbatasan dana adalah masalah klasik yang dihadapi semua objek wisata dalam proses pengelolaannya. Namun kita harus tetap berusaha agar target kita pada tahun 2023 ini Pantai Tanah Kuning sudah rampung pembangunannya”
(Wawancara dengan Ibu Maria, tanggal 13 Juni 2023).

Hasil wawancara tersebut di atas, menegaskan bahwa benar keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning. Namun tidak menjadi penghalang untuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan untuk mengelola objek wisata Pantai Tanah Kuning.

Apabila Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata hanya mengandalkan APBD dalam pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning itu sangat sulit dalam pelaksanaannya. Objek wisata yang besar seperti Pantai Tanah Kuning akan memakan banyak anggaran daerah, sedangkan masih banyak urusan-urusan lain yang harus dibiayai oleh pemerintah daerah secara umum. Dikutip dari hasil wawancara dengan

Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata yang mengatakan bahwa:

*“...Yang jadi kendala dalam pengelolaan objek wisata ini yaitu pendanaan dari APBD yang kurang maksimal karena kalau kita menunggu itu akan lambat, kita menunggu lagi APBD tahun depan. Jadi kalau kita hanya mengharapkan dari APBD maka akan lambat proses pembangunannya.”
(Wawancara dengan Bapak Anwar, tanggal 13 Juni 2023).*

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa apabila Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata hanya mengandalkan APBD, maka yakinlah bahwa pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning ini akan lambat, dan tidak mencapai target yang diinginkan.

Merangkum dari semua hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa memang dana menjadi kendala yang dialami pemerintah dalam proses pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning ini.

b) Tidak adanya Kerjasama dengan pihak swasta

Kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengembangan dan pengelolaan objek wisata khususnya objek wisata Pantai Tanah Kuning memang harus dilakukan agar lebih cepat pembangunannya dengan suntikan dana dari pihak swasta. Namun ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bulungan dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dengan alasan tidak adanya ruang

untuk mereka menanamkan modalnya. Ketersediaan lahan yang terbatas itulah yang menjadi penyebabnya. Kepala Bidang Pengembangan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa:

“...Kita bukan tidak ingin melakukan kerjasama dengan pihak swasta, tapi kami terkendala di ketersediaan lahan. Ada investor yang ingin membuat water park, tapi kita menolak dengan alasan lahan yang masih kurang. Dan sebenarnya ada juga yang ingin membuat panti pijat dan club malam di objek wisata ini, namun kita tolak dengan alasan menjaga nama baik Bulungan”
(Wawancara dengan Bapak Anwar, tanggal 13 Juni 2023).

Dari hasil wawancara di atas menegaskan bahwa Pemerintah Sadar akan pentingnya kerjasama dengan pihak swasta sangat disadari oleh pemerintah daerah yang sebenarnya ingin mengikut sertakan pihak swasta atau investor untuk menanamkan modalnya. Namun kendala tersebut diatas yang menjadi penyebabnya, serta pemerintah menolak adanya sarana yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan juga menyadari pentingnya kerjasama dengan pihak swasta dalam proses pengelolaan objek wisata. Seperti yang dikutip dalam wawancara berikut:

“...Sebenarnya sangat bagus apabila kita mendatangkan investor dari luar seperti pihak swasta untuk turut serta dalam pengelolaan objek wisata ini. Namun ada hal yang harus dipertimbangkan dulu sebelum melakukan kerjasama itu” (wawancara dengan Bapak Anwar, tanggal 13 Juni 2023).

Dari hasil wawancara di atas menegaskan bahwa pemerintah sangat ingin melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Namun ada kendala lain yang tidak memungkinkan untuk saat ini pihak swasta ikut serta dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning.

Jadi kerjasama dengan pihak swasta dapat membantu proses pengembangan dan pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning. Namun hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah berhubung Pantai Tanah Kuning belum memiliki lahan yang cukup dan pemerintah sangat menjaga nama baik Kabupaten Bulungan dengan tidak bekerjasama dengan kelompok usaha, yang usahanya berbau maksiat.

2) Penyediaan Lahan

a) Ketersediaan lahan masih kurang

Lahan yang ada di Pantai Tanah Kuning masih belum cukup luas untuk pengembangan objek wisata ini. Terbukti dengan tidak diterimanya pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Pantai Tanah Kuning karena ketersediaan lahan yang kurang untuk mendukung keberadaan pihak swasta

tersebut yang ingin membuat water park di dalam kawasan objek wisata Pantai Tanah Kuning tersebut seperti yang dikutip dari wawancara berikut:

“...Sebenarnya kita masih ingin menambah sarana dan prasarana yang ada di objek wisata ini, namun ketersediaan lahan yang menghambat semua itu. Salah satunya kita ingin menghadirkan water park di kawasan objek wisata ini namun seperti yang saya katakan tadi, lahan tidak mencukupi untuk itu” (Wawancara dengan Bapak Anwar, tanggal 13 Juni 2023).

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa lahan yang dimiliki oleh objek wisata Pantai Tanah Kuning menjadi kendala yang besar dalam proses pembangunan dan pengelolaannya. Ada banyak sebenarnya yang bisa dihadirkan di objek wisata ini, namun masalah lahan yang tidak begitu luas untuk menghadirkan semua itu.

b) Sarana dan prasarana yang belum tersedia

Sarana dan prasarana yang belum tersedia membuat objek wisata tidak begitu maksimal dalam pengelolaannya. Dan itu juga dirasakan oleh pemerintah daerah dalam proses pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning. Seperti yang dikemukakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan berikut:

“...Sebenarnya kita masih terkendala di sarana dan prasarana yang masih kurang. Seperti kita belum memiliki palang otomatis dan cctv yang bisa menghitung jumlah kendaraan yang masuk ke objek wisata Pantai Tanah Kuning agar tidak ada yang lolos dari pengawasan petugas”
(Wawancara dengan Ibu Maria, tanggal 13 Juni 2023).

Dari hasil wawancara di atas menegaskan bahwa Pantai Tanah Kuning masih butuh sarana yang mampu membantu pemerintah agar pengelolaan yang dilakukan lebih maksimal.

Walaupun sarana dan prasarana yang ada di objek wisata Pantai Tanah Kuning masih terbatas itu tidak mengurangi semangat pemerintah dalam mengelola objek wisata Pantai Tanah, pemerintah daerah akan selalu berusaha melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi:

“...Kami akan selalu berusaha untuk mempercepat pengadaan sarana dan prasarana yang mampu mendukung pengembangan dan pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan” (wawancara dengan Bapak Anwar, tanggal 13 Juni 2023).

Dari hasil wawancara diatas menegaskan bahwa dapat kita lihat keseriusan pemerintah daerah untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam objek wisata Pantai Tanah

Kuning dalam rangka meningkatkan usaha pengelolaan objek wisata ini.

4.2. Pembahasan

a. Model Kemitraan dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan

Dalam hubungan kemitraan *Partnership* pemerintah yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata beserta semua instansi pemerintah yang terkait dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning dan kelompok masyarakat ini berperan atau bekerja sama dalam menyusun kebijakan, memberikan penyuluhan atau pengarahan, kemampuan dan keterampilan yang memihak kepada kepentingan Kelompok Masyarakat. Kemitraan *Linear Collaborative*, tidak membedakan besaran volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak, namun tekanan utama adalah kesamaan visi dan misi. Hubungan terjadi pada garis lurus dan tidak saling ter subordinasi. Kemitraan *Mutualistik*, persekutuan dua pihak atau lebih yang sama - sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yakni Pemerintah melibatkan Masyarakat umum untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama secara optimal.

Ketika pengelolaan yang dilakukan berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah meningkatnya jumlah wisatawan yang ada di objek

wisata Pantai Desa Tanah Kuning dan akhirnya akan berimbas kepada pendapatan daerah dan itu menandakan keberhasilan pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan objek wisata, khususnya Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan.

Saling menghargai, Penghargaan dan percaya yang diberikan oleh pemerintah selain sebagai bentuk apresiasi juga sebagai bentuk menciptakan kesetaraan atau keseimbangan dalam bermitra. Sebagai acuan dalam melaksanakan kewajiban, hak dan penghargaan maka pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat berpedoman dengan dalam (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009 Nomor 10 tahun 2009) tentang kepariwisataan antara lain yang mengatur kewajiban dan hak pemerintah dan pemerintah daerah, kewajiban dan hak pengusaha pariwisata hak orang, hak prioritas orang didalam/ sekitar destinasi, penghargaan dan lain-lain. Adanya penghargaan, kewajiban dan ikatan sehingga menciptakan suatu kesetaraan atau keseimbangan terhadap pelaksanaan kemitraan yang dijalin pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulungan adalah sudah cukup baik. Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sebagian besar sudah melaksanakan kewajibannya masing-masing walaupun ada beberapa pihak yang belum melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Penghargaan yang diberikan dari masing-masing pihak dilakukan agar menciptakan hubungan kerjasama yang sinergi sehingga

pengembangan pariwisata akan terus mengalami kemajuan. Sama halnya dengan ikatan yang telah dituangkan dalam surat perjanjian menjadikan salah satu upaya agar lebih mengikat secara formal dan menciptakan kesetaraan atau keseimbangan antar pihak yang terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan, kewajiban dan ikatan diatur dalam UU No 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan. Pola kemitraan tentunya harus mengembangkan prinsip yang saling sinergi antara satu sama lain. Sehingga keakraban saling memiliki akan destinasi wisata yang ada.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Ulil Amri dengan Judul Kemitraan Pemerintah Dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni Di Kabupaten Bantaeng.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Objek Wisata Pantai Desa Tanah Kuning

Letak Geografis Pantai Desa Tanah Kuning diunggulkan karena memang dekat dengan jalan raya, sehingga akses untuk menuju ke tempat wisata tersebut sangat mudah dan itu juga berpengaruh besar terhadap pengelolaannya. Partisipasi aktif dari masyarakat, pengelola objek wisata dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk mendukung pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bulungan, memang sudah seharusnya dilakukan mengingat objek wisata Pantai Tanah Kuning yang ada di Kabupaten Bulungan berada dekat dengan jalan raya dan tempatnya yang strategis maka hal yang paling kecil yang bisa membantu

pemerintah adalah dengan menjaga kebersihan di objek wisata Pantai Tanah Kuning tersebut agar wisatawan juga betah saat berwisata.

Dalam objek pariwisata sesuatu yang menjadi unggulan adalah sebuah pemandangan atau panorama yang dimiliki oleh objek wisata yang dimaksud. Potensi dari sebuah panorama perlu diperhitungkan sebagai keunggulan yang bersifat natural panorama yang mumpuni dapat menarik wisatawan untuk berkunjung sebagai sisi positif dan peluang penuh bagi Pantai Tanah Kuning itu sendiri. Pantai Tanah Kuning memiliki pemandangan yang mumpuni jika dilihat oleh pandangan wisatawan jika berkunjung pada pagi atau sore hari, beberapa wisatawan menyukai dengan panorama yang dimiliki Pantai Tanah Kuning. Panorama yang ada itu menjadi peluang bagi Pantai Tanah Kuning untuk menjadikan destinasinya tersebut sebagai destinasi wisata yang mampu menarik wisatawan. Hal ini menjadi potensi atau peluang yang dapat diandalkan dalam menarik wisatawan untuk berkunjung bersama keluarga untuk menikmati panorama yang ada di Pantai Tanah Kuning. Untuk itu Pantai Tanah Kuning dapat bersaing dengan wisata lokal lain dengan memanfaatkan panorama indah yang dimiliki sebagai aset alamiah yang cukup diperhitungkan.

Apabila Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata hanya mengandalkan APBD, maka yakinlah bahwa pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning ini akan lambat, dan tidak mencapai target yang diinginkan. Merangkum dari semua hasil wawancara, dapat disimpulkan

bahwa memang dana menjadi kendala yang dialami pemerintah dalam proses pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning ini.

Pantai Tanah Kuning masih butuh sarana yang mampu membantu pemerintah agar pengelolaan yang dilakukan lebih maksimal. Walaupun sarana dan prasarana yang ada di objek wisata Pantai Tanah Kuning masih terbatas itu tidak mengurangi semangat pemerintah dalam mengelola objek wisata Pantai Tanah, pemerintah daerah akan selalu berusaha melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan objek wisata Pantai Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan.

Dalam pengembangan wisata perlunya meningkatkan aspek promosi wisata hal ini bertujuan agar wisatawan tertarik untuk berkunjung. Saat ini Pantai Tanah Kuning belum adanya aspek promosi wisata dan hal ini pun menjadi faktor penghambat yang telah lama dirasakan dan belum ada solusi yang optimal. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menyadari akan pentingnya promosi dalam hal wisata untuk itu promosi perlunya digenjot terus-menerus dengan berbagai program inovasi guna menarik wisatawan untuk berkunjung.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Ulil Amri dengan Judul Kemitraan Pemerintah Dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Seruni Di Kabupaten Bantaeng.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya yakni mengenai model kemitraan dalam mengelola sektor wisata pantai desa tanah kuning, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dari tiga bentuk Kemitraan yang di terapkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kemitraan yang paling dominan dalam penelitian ini adalah Kemitraan *Partnership*. Kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat membuat sebuah kebijakan untuk peningkatan kebersihan dan keindahan di objek wisata Pantai Tanah Kuning. Pemerintah dan Kelompok Masyarakat menghimbau kepada seluruh jajaran yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan Objek wisata Pantai Tanah Kuning ini untuk lebih meningkatkan lagi kualitas kerjanya sesuai dengan Visi dan Misi. Dengan terbentuknya kerjasama sama antara Pemerintah dan Kelompok Masyarakat ini, masyarakat umum yang ada di Kabupaten Bulungan secara perlahan mulai menyadari akan pentingnya kebersihan dan hidup sehat.
- b. Faktor Pendukung dan Penghambat : a) Letak Geografis, letak Pantai Tanah Kuning yang dekat dari jalan raya dan berada tepat di pesisir kota Kabupaten Bulungan. b) kesadaran Masyarakat yang mulai tumbuh akan pentingnya menjaga kebersihan. c) terjalinnya komunikasi antara Dinas

Pariwisata dengan Instansi lain yang terkait. d) karna lahan yang masih kurang, mengakibatkan sarana dan prasarana di Pantai Tanah Kuning ini belum memadai, hal ini diakibatkan karna anggaran pendapatan daerah belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada di Pantai Tanah Kuning dan tidak adanya kerja sama dengan pihak swasta.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) Kabupaten Bulungan agar pelaksanaannya sesuai dengan yang telah di tuangkan dalam RIPDA Kabupaten Bulungan.
- b. Diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata yang belum rampung sampai saat ini
- c. Perlunya penambahan pusat informasi pariwisata demi kemudahan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Objek wisata Pantai Tanah Kuning, karena pusat informasi pariwisata sangat penting untuk pengembangan dan pengelolaan objek wisata.
- d. Kinerja para pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Bulungan khususnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata agar ditingkatkan lagi, meskipun saat ini kinerjanya cukup memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan. Gaya Media. Yogyakarta
- Ankie, M, M. 1985. Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Donggasilomba, D.B. 2011. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. Skripsi Tidak Diterbitkan. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Gunawan, M, P. 2000. Pengelolaan Pariwisata. Andi. Jakarta
- Linton Ralph. 1986. Antropologi Penyelidikan tentang Manusia, Alih Bahasa.
- Nur Arifin, H, M. 1997. Ilmu Sosial Pasar. Pustaka Setia. Jakarta
- Pitana I Gede, dkk. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Edisi Pertama Andi. Jakarta
- Siagian, Sondang. 2007. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. PT Gunung Agung. Jakarta
- PP RI No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional
- Santoso, Singgih. 2000. Mengolah Data Statistik secara Profesional. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Soekanto Soerjono. 1982. Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat: Ghali Indonesia. Jakarta
- Taneka, Soleman, B. 1984. Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. CV Rajali. Jakarta
- Wahab Salah. 1992. Pemasaran Pariwisata. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Wardiyanta. 2006. Metode Penelitian Pariwisata. Andi. Yogyakarta
- Wibisono

Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Publishing. Gresik

Sumber Undang-Undang / Peraturan

Undang- Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda)

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya atas nama Andhika Masharafi Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kalimantan Utara . Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian tugas akhir yang berhubungan dengan Studi Model Kemitraan Dalam Mengelolaan Sektor Wisata Pantai Desa Tanah Kuning. Dimana penelitian ini hanya bertujuan untuk kepentingan penelitian semata dalam menyusun Skripsi.

Hari/Tanggal :

Lokasi :

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan/Pekerjaan :

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PEMERINTAH (DINAS PARIWISATA)

1. Kebijakan seperti apa yang di keluarkan pemerintah dalam pengembangan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bulungan?
 - a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai fasilitator dan regulator pengembangan pariwisata.
 - b. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata dan pelestarian budaya.
2. Model kemitraan seperti apa yang di lakukan antara dinas pariwisata dan instansi lainnya terkait dalam pengelolaan objek wisata pantai tanah kuning?
3. Adakah program baru atau upaya-upaya pemerintah menyangkut pengelolaan objek wisata di pantai tanah kuning?

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PEMERINTAH (KELURAHAN)

1. Seperti apa peran yang dijalankan dari pihak kelurahan menyangkut dalam pengelolaan objek pariwisata pantai tanah kuning?
2. Seperti apa Kerjasama pihak kelurahan dengan para pengelola pantai tanah kuning?
3. Bagaimana harapan pihak kelurahan terhadap pantai tanah kuning kedepannya?

DAFTAR WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pengelolaan pantai tanah kuning?
2. Bagaimana harapan bapak/ibu kedepannya mengenai pengelolaan pantai wisata tanah kuning?
3. Seperti apa kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai tanah kuning?
4. Bagaimana letak geografis atau akses jalan menuju pantai tanah kuning?
5. Bagaimana bentuk informasi dan kordinasi antara dinas pariwisata dan SKPD lainnya yang terkait ?
6. Bagaimana pendanaan dalam pengelolaan objek wisata pantai tanah kuning?
7. Bagaimana penyediaan lahan dalam pengelolaan objek wisata di pantai tanah kuning?
8. Bagaimana dengan persoalan sarana dan prasarana dalam pengelolaan objek wisata di pantai tanah kuning?

DOKUMENTASI KEGIATAN

